

## **PENGELOLAAN KAWASAN PERKAMPUNGAN INDUSTRI KECIL (PIK) BPLIP PULOGADUNG BERBASIS MASYARAKAT**

Diah Pitaloka Citaresmi<sup>1</sup>, Dahlia Eka Syahputri Kencana<sup>1</sup>,

<sup>1</sup>Jurusan Teknik Planologi, Universitas Esa Unggul

Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510

dahlia.kenny@yahoo.com

### **Abstrak**

Pengelolaan berbasis masyarakat adalah kemampuan swakelola oleh masyarakat melalui instansi RT/RW merupakan potensi yang harus dimanfaatkan oleh pihak pengelola, merupakan bentuk *community development*. Perkampungan yang menjadi obyek penelitian yaitu Perkampungan Industri Kecil (PIK) BPLIP Pulogadung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan yang berlangsung di dalam kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) BPLIP Pulogadung, untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat PIK BPLIP dalam melaksanakan pengelolaan kawasan di tempat tinggalnya, dan untuk meningkatkan sistem pengelolaan kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) yang melibatkan partisipasi masyarakat PIK BPLIP Pulogadung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis *crosstabs* dengan menggunakan system SPSS 15. Hasil pengolahan kuisioner kepada masyarakat PIK BPLIP menggambarkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masih rendahnya partisipasi warga yaitu pendidikan masih rendah sehingga mempengaruhi pola pikir warga, dana masih terbatas, pengetahuan responden masih rendah sehingga tidak langsung menerapkannya. Kebanyakan orang akan melihat akan pelaksanaan pengawasan peraturan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pihak pengelola, kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan kawasan PIK BPLIP pulogadung masih rendah, SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih rendah terhadap peran sertanya dalam pengelolaan kawasan.

**Kata kunci:** perkampungan industri kecil, pengelolaan berbasis masyarakat, *community development*

### **Pendahuluan**

Industri kecil termasuk dalam industri wisata yang memiliki hasil produksi yang tidak begitu besar. Dalam hal ini, aspek teknis pengelolaan kawasan merupakan salah satu usaha untuk menunjang iklim industri yang sehat.

Berdasarkan RTRW Kecamatan Cakung 2005, kegiatan industri kecil yang berada di Pulogadung terutama di Kelurahan Penggilingan, Duren Sawit dan Kramat Jati diarahkan berlokasi di dekat permukiman hanya untuk jenis industri kecil dan tidak berpolusi, serta berwawasan lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang, perencanaan ruang, dan pengendalian ruang. Karena itu, perlu ditingkatkan pemberdayaan masyarakat berdasarkan program *community development* dengan pendekatan partisipasi terhadap pengelolaan kawasan tempat tinggal mereka yang berada di Perkampungan Industri Kecil.

Menurut Undang-undang no.9 tahun 1995 tentang usaha kecil, maka batasan industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial.

Kekuatan industri kecil, yaitu :

1. Hubungan antar aspek fisik dan *engineering*.
2. Produk dimana tenaga kerja terampil dan ketelitian yang tinggi merupakan faktor penting.
3. Produksi dari komponen khusus.
4. Produk yang hanya dibuat dalam jumlah kecil.
5. Produk dengan keunggulan khusus dalam aspek desain ataupun produk khusus dalam pembuatannya.
6. Hubungan antar manusia yang lebih erat.
7. Pelayanan penjualan akan lebih baik.

8. Industri kecil sanggup bertindak cepat untuk memanfaatkan kesempatan berkembang.

Kelemahan industri kecil antara lain :

1. Kelemahan wawasan bisnis serta pengetahuan mengelola usaha dengan baik.
2. Kesulitan mendapat akses ke pasar karena keterbatasan pengetahuan mengenai jaringan pemasaran yang ada.
3. Keterbatasan pengetahuan yang menyangkut manajemen produksi.
4. Keterbatasan modal.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, perkampungan berasal dari kata dasar "kampung" artinya tempat tinggal. Perkampungan adalah tempat atau daerah tempat tinggal dari masyarakat. Menurut Soekanto, masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Masyarakat sebagai sejumlah individu yang hidup bersama meniptakan peraturan-peraturan pergaulan kemudian meniptakan kebudayaan masyarakat tersebut (Hariyono, Paulus 2007).

Perkampungan terbentuk dari suatu satuan-satuan komuniti yang hidup seara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:

- a. Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
- b. Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.

Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah kelurahan, dan bukan hunian liar.

Warga yang bertempat tinggal di wilayah Perkampungan Industri Kecil merupakan masyarakat. Jadi, perkampungan di kawasan PIK BPLIP ini dapat diartikan sebagai masyarakat yang dapat memproduksi sendiri kebutuhan pokok hidupnya. Warga perkampungan industri kecil direkrut sendiri melalui biologis dan warga di perkampungan ini terlibat sosialisasi terhadap tempat tinggal mereka, dimana di dalam suatu perkampungan tersebut terdapat kegiatan industri.

Pengelolaan Berbasis Masyarakat dalam studi ini yaitu Kemampuan swakelola oleh masyarakat melalui instansi RT/RW merupakan potensi yang harus dimanfaatkan oleh pihak pengelola, merupakan bentuk *community development* (Biddle, William 1965) dalam tatanan komunitas masyarakat perkampungan industri kecil. Perkembangan prinsip *community development* yang didasari oleh masyarakat memiliki kemampuan untuk mengurus dan mengatur dirinya seperti pembangunan renovasi

masjid, gotong royong dan sebagainya dalam perannya mengelola kawasan.

Menurut Jack Rothman (1979), *Community Development atau Pemberdayaan Masyarakat* adalah sebuah model pengembangan masyarakat yang menekankan pada partisipasi penuh seluruh warga masyarakat. PBB (1955) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin menumbuhkan prakarsa.

Secara umum, *community development* dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang lebih baik. Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Program *Community Development* memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Dua sasaran yang ingin dicapai yaitu: sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan.

Keberhasilan program *community development* ditekankan pada 3 aspek, yaitu :

- a. *Community Services* merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
- b. *Community Empowering* adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya.
- c. *Community Relation* yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan komunikasi dan informasi kepada pihak yang terkait.

Menurut Ife (1995) ada 22 (dua puluh dua) prinsip dalam pengembangan masyarakat, beberapa prinsip yang mendasar yaitu:

#### 1. *Integrated Development*

Kegiatan pengembangan masyarakat harus merupakan sebuah pembangunan yang terintegrasi, yang dapat mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan spiritual. Kegiatan pengembangan masyarakat difokuskan pada satu aspek, maka kegiatan tersebut harus memperhatikan dan memperhitungkan keterkaitan dengan aspek lainnya.

#### 2. *Human Right*

Kegiatan pengembangan harus dapat menjamin adanya pemenuhan hak bagi setiap manusia untuk hidup secara layak dan baik.

### 3. *Empowerment*

Pengembangan masyarakat menjadi proses belajar bagi masyarakat untuk meningkatkan dirinya, sehingga kegiatan pengembangan masyarakat dapat berkelanjutan.

### 4. *Self-reliance*

Kegiatan pengembangan masyarakat sedapat mungkin memanfaatkan berbagai sumber yang dimiliki oleh masyarakat daripada menggantungkan kepada dukungan dari luar. Adapun sumber yang berasal dari luar haruslah hanya sebagai pendukung saja.

### 5. *Organic Development*

Kegiatan pengembangan merupakan proses yang kompleks dan dinamis. Selain itu, masyarakat sendiri mempunyai sifat organis. Oleh karena itu, untuk bisa berkembang membutuhkan lingkungan dan kondisi yang sesuai dengan keadaan masyarakat yang unik. Untuk itu percepatan perkembangan masyarakat hanya bisa ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, dalam pengertian ditentukan oleh kondisi dan situasi pada masyarakat.

### 6. *The Integrity of Process*

Proses di dalam pengembangan masyarakat akan melibatkan berbagai pihak, berbagai teknik, berbagai strategi, yang kesemuanya harus terintegrasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar.

### 7. *Cooperation* (Koperasi)

Pengembangan masyarakat lebih membutuhkan struktur yang kooperatif, mengingat proses pengembangan masyarakat dilakukan untuk dalam kondisi yang harmonis dan tanpa kekerasan. Kerjasama akan dapat lebih menguntungkan, karena dalam prosesnya terjadi saling melengkapi dan saling belajar.

### 8. *Participation* (Partisipasi)

Pengembangan masyarakat sedapat mungkin memaksimalkan partisipasi masyarakat, dengan tujuan agar setiap orang dapat terlibat secara aktif dalam aktivitas dan proses masyarakat. Partisipasi ini juga harus didasarkan kepada kesanggupan masing-masing. Artinya bahwa setiap orang akan berpartisipasi dengan cara yang berbeda-beda. Dengan demikian perlu diperhatikan adanya upaya-upaya yang dapat menjamin partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurut kamus tata ruang pengertian partisipasi adalah ikut serta secara aktif dalam suatu kegiatan, misalnya dalam proses atau persiapan perencanaan dan pembangunan kawasan atau bangunan. Tiga prinsip dalam menumbuhkan pengembangan partisipasi, yaitu:

- a. Proses kegiatan dengan melakukan aktivitas proyek dan sekaligus mengamati, menganalisa kebutuhan dan keinginan masyarakat
- b. Melakukan kegiatan melalui pengembangan pranata sosial yang sudah ada dalam masyarakat.  
Pengembangan institusi perlu dilakukan karena dengan institusi yang ada di masyarakat, berarti berperan serta dalam institusi yang ada
- c. *Participatory*. Cara ini merupakan pendekatan yang umum dilakukan agar dapat menggali kebutuhan yang ada dalam masyarakat atau komunitas. *Participatory* dalam arti luas merupakan pendekatan keikutsertaan dalam segala aktivitas yang berlaku di masyarakat.

Sistem pendanaan kegiatan *Community Development* harus memberikan pesan kepada masyarakat bahwa kegiatan yang ditangani adalah kegiatan masyarakat yang dibantu oleh pengelola dan bukan yang dihadiahkan kepada masyarakat. Sistem pendanaan harus dapat menciptakan rasa tanggung jawab dalam diri masyarakat atas kegiatan yang ditanganinya.

Kemampuan finansial untuk mengelola kawasan merupakan suatu bagian yang tak terlepas dari fungsi pengelolaan kawasan. Saat ini sumber-sumber pendanaan kawasan diperoleh dari:

#### 1. **Dana Mitra.**

Dana ini dikelompokkan kepada 2 sumber yaitu sumber APBD dan sumber swasta/pihak luar, yang bersumber dari APBD yaitu dana pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh unit/satuan kerja Pemda termasuk dana untuk program PPMK. Adapun dana yang bersumber dari pihak luar adalah sumber pendanaan dari pihak swasta, lembaga donor, dan pihak luar lainnya yang memiliki kepedulian untuk melaksanakan kegiatan di kawasan yang mendukung pemeliharaan kawasan.

#### 2. **Dana Swadaya.**

Dana ini bersumber dari masyarakat di kawasan sebagai bagian dari partisipasi mereka.

Pendanaan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menyangkut aspek fisik, sosial dan masyarakat. Pendapatan dana tersebut tidak sepenuhnya dikembalikan, dikarenakan sumber dana harus diserahkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) selanjutnya dikembalikan dalam bentuk APBD, sehingga daya survive kawasan harus ditunjang oleh pihak pengelola menggali sumber-sumber pendanaan keuangan dan kemampuan pengelolaan financial. Dengan demikian akan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan kawasan secara keseluruhan baik fisik, sosial dan ekonomi.

Dana yang didapatkan dari APBD merupakan usaha dari pihak pengelola kawasan dengan memuat program kinerja dan kegiatan yang dibuat untuk 1 tahun berjalan. Besaran pendanaan dari APBD bergantung pihak pengelola saat mempresentasikan dan mempertahankan program yang telah dibuat.

### Metode Penelitian

Sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang diajukan dalam bab 1 (satu). Maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif.

- a. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan melihat mengetahui tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tingkat pengetahuan terhadap kegiatan yang berlangsung di PIK, serta memberikan gambaran yang jelas akan sistem pengelolaan kawasan yang melibatkan masyarakat Perkampungan Industri Kecil (PIK) BPLIP Pulogadung Kecamatan Cakung Kotamadya Jakarta Timur.
- b. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan perilaku responden, serta hubungan antara kesadaran responden terhadap wilayah tempat tinggalnya.

Adapun metode perhitungan analisis kuantitatif yang digunakan adalah **Metode Tabulasi Silang (Crosstabs)**. Crosstabs berguna untuk menampilkan tabulasi silang (tabulasi kontigensi merupakan pengukuran asosiasi berdasarkan Chi-Square) yang menunjukkan suatu distribusi bersama dan pengujian dua variabel atau lebih, terutama sekali variabel dalam bentuk kategori dengan menggunakan software SPSS 15. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\chi^2 = \sum [(o_{ij} - e_{ij})^2 / e_{ij}]$$

Dimana,  $o_{ij}$  menyatakan banyaknya observasi dan  $e_{ij}$  menyatakan banyaknya observasi yang diharapkan dalam sel  $(i-j)$  dengan syarat kedua variabel tidak berasosiasi. Sedangkan,  $\Sigma$  adalah penjumlahan yang dilakukan untuk semua  $i$  dan  $j$ .

### Analisis

Berdasarkan hasil tabulasi Pengelolaan Kawasan Berbasis Masyarakat di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat PIK BPLIP masih rendah. Artinya, faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat yaitu, sebagai berikut :

1. Pendidikan yang masih rendah sehingga mempengaruhi pola pikir warga, hal ini merupakan salah satu faktor penyebab sempitnya peluang dan akses mereka untuk dapat meningkatkan usaha ekonominya;
2. Dana masih terbatas, sehingga pembiayaan pemeliharaan kawasan masih dipandang berat oleh warga yang berpendapatan rendah;
3. Pengetahuan warga yang masih rendah sehingga tidak langsung menerapkannya. Kebanyakan orang akan melihat akan pelaksanaan pengawasan peraturan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pihak pengelola;
4. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan kawasan PIK BPLIP Pulogadung masih rendah. Hal ini disebabkan, di lingkungan PIK BPLIP telah terdapat peraturan, fasilitas pendukung dan pengawasan dari pihak pengelola. Sedangkan kesadaran dalam pengelolaan kawasan merupakan murni kesadaran diri sendiri terhadap peran sertanya memelihara tempat tinggal
5. SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih rendah terhadap peran sertanya dalam pengelolaan kawasan.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk sistem pengelolaan kawasan yang melibatkan masyarakat PIK BPLIP melalui strategi dan tahap pelaksanaan berdasarkan community development, sebagai berikut :

1. Strategi integrasi program
2. Strategi pendanaan
3. Strategi pengorganisasian masyarakat
4. Tahapan Pelaksanaan

Langkah-langkah ini lebih menekankan kepada pemberdayaan masyarakat PIK BPLIP dengan bekerja sama kepada pihak pengelola dan institusi-institusi terkait. Kegiatan pengembangan

masyarakat dalam pengelolaan kawasan merupakan salah satu kegiatan community development dengan proses penelitian dan perencanaan. Proses dalam community development dikenal dengan *participatory action research* (PAR).

### **1. Strategi Integrasi Program**

Program Community Based Development (CBD) dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan. Sehingga pengintegrasian program sangat penting dilakukan.

Membangun keterpaduan dan integrasi program melalui rapat atau pertemuan dan melibatkan stakeholders lainnya untuk membahas masalah serta mengambil berbagai kebijakan yang terintegrasi antara satu program dengan program lainnya. Proses pelaksanaan ini ditujukan untuk :

- a) Menghindari tumpang tindih;
- b) Menjamin tercapainya misi yang efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan;

### **2. Strategi pendanaan**

Dalam pengelolaan kawasan berbasis masyarakat diperlukan program pendanaan, upaya-upaya pemanfaatan dana dalam implementasinya, yaitu :

#### **1. Dana Swadaya**

Dana ini bersumber dari masyarakat di kawasan sebagai bagian dari partisipasi mereka dalam mengelola kawasannya. Iuran yang akan dikenakan sebesar Rp. 2.000,- perbulan untuk kegiatan kebersihan yang dilakukan warga. Selebihnya bantuan teknis dari pihak pengelola yang dilakukan oleh fasilitator dapat memanfaatkan dan mengembangkan kapasitas warga melalui pelatihan untuk memberikan wawasan, motivasi dan keterampilan bagi warga.

#### **2. Dana atau Pembiayaan Oleh Lembaga Formal**

Dana program ini bersumber dari APBD yang disalurkan melalui Pemda DKI Jakarta dalam bentuk pengembangan masyarakat.

### **3. Strategi Pengorganisasian Masyarakat**

Proses pengorganisasian masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan simpul-simpul komunitas yang telah ada dan berperan di berbagai jenis kegiatan, bila diperlukan dapat dilakukan pembentukan kelompok-kelompok sesuai dengan kebutuhan.

Untuk mendukung penguatan kelompok hingga berjalan secara optimal, sehingga dapat melaksanakan fungsi sebagai fasilitator, motivator dan sebagai pengelola melakukan aktivitas pengelolaan kawasan bersama masyarakat, yaitu :

- Membangun keanggotaan masyarakat yang aktif, yaitu dalam bentuk masyarakat memahami konsep swadaya, menetapkan tujuan masyarakat, menetapkan dan memiliki anggota kelompok secara demokratis, mengembangkan aturan kelompok di dalam pengorganisasian, dan merancang pertemuan kelompok;
- Mengembangkan kualitas kegiatan yang dilakukan masyarakat. Strategi yang dapat dikembangkan yaitu bimbingan penyusunan rencana kegiatan, mengenal sumber-sumber dana untuk melaksanakan kegiatan, membangun kerjasama dengan pihak luar, contoh melalui pola;
- Mengembangkan koordinasi dan sinergi antara pengelola dan masyarakat;

### **4. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Masyarakat, yaitu :**

#### **a. Sosialisasi Program**

Pengelolaan sebuah kawasan yang dilakukan oleh semua masyarakat, kelembagaan dan lainnya merupakan salah satu kunci sukses dari sebuah program. Karena dengan diketahuinya informasi tersebut masyarakat dapat ikut serta untuk melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kawasan.

Program yang dilakukan di Perkampungan Industri Kecil untuk masyarakat PIK ini sebagai berikut :

- Dilakukan secara merata kepada semua lapisan masyarakat, dengan cara ini diharapkan semua unsur dan lapisan masyarakat dapat memahami dan semakin banyak pula yang mau berperan serta;
- Materi informasi yang diberikan secara detail dan menyeluruh, tidak terpotong-potong. Dengan demikian dapat dihindari dari kekeliruan pemahaman penerima informasi;
- Dalam memberikan informasi telah menggunakan dan memanfaatkan media yang mendukung seperti melalui brosur dan produk;
- Memanfaatkan dan menggunakan berbagai pertemuan di tingkat masyarakat untuk menyampaikan

informasi tentang program yang akan dilakukan.

Pelaksanaan sosialisasi program dilakukan secara pertemuan dihadiri oleh tokoh masyarakat, RW, RT, Dewan Kelurahan, Pihak Pengelola dan institusi yang terkait.

b. Pembentukan Organisasi

Pada kegiatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan dilakukan kegiatan pengorganisasian masyarakat melalui kelompok-kelompok sesuai dengan jenis kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kelompok yang terlibat dalam pengelolaan kawasan berfungsi dan berperan :

- Berfungsi sebagai wadah aspirasi dan partisipasi warga;
- Forum untuk pemecahan permasalahan atau sumbang saran dalam memecahkan permasalahan anggota secara kelompok ;
- Wahana bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan pihak lain;
- Wadah untuk pengembangan kapasitas anggotanya dalam menata sosial, ekonomi dan lingkungannya.

Tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu :

- Proses penyadaran warga terhadap permasalahan pengelolaan kawasan;
- Proses pengelompokan warga menurut jenis kegiatan yang akan dilakukannya;
- Proses pembentukan kelompok melalui pertemuan-pertemuan;
- Proses penguatan kelompok dengan pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Pekerjaan.

Peran dari institusi lokal, yaitu :

**Kelompok Kerja**

- Mengorganisir kegiatan pengelolaan kawasan;
- Mengkoordinir, memotivasi dan memfasilitasi kelompok-kelompok yang tumbuh dan berkembang di Perkampungan Industri Kecil ini khususnya pembinaan dan pelatihan;
- Mengembangkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan;
- Memberikan konsultasi kepada warga berkaitan dengan pengelolaan kawasan;
- Membantu kelompok pengelola agar dapat memiliki akses ke pihak mitra untuk

meningkatkan kemampuan dan teknis manajemen, permodalan dan lainnya.

**Kelompok Aksi/Pengelola**

- Memfasilitasi dan memotivasi anggotanya untuk berperan serta dalam pengelolaan kawasan sesuai dengan jenis kegiatannya;
  - Melakukan perencanaan dan pengelolaan di bidangnya;
  - Melakukan pemeliharaan dan perawatan;
  - Melakukan penyuluhan kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.
- c. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
- Setelah warga mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok dengan jenis kegiatan yang ada, langkah selanjutnya melakukan penguatan kapasitas warga. Proses penguatan kapasitas ini dilakukan melalui pelatihan-pelatihan menurut kebutuhan dan jenis kegiatan masing-masing kelompok.
- Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada kegiatan pengelolaan kawasan yang melibatkan masyarakat ini mencakup 5 jenis pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk penguatan wadah/kelompok masyarakat sebagai berikut :
1. Pelatihan Motivator Pemeliharaan Fisik Lingkungan  
Pelatihan motivator dilaksanakan dengan sasaran memberikan motivasi, semangat, kesadaran, sehingga pelatihan ini diharapkan memiliki semangat, motivasi, jiwa optimis dan berpikir positif untuk berperan serta dalam pengelolaan kawasan.  
Pelatihan ini mencakup :
    - Cara mengontrol emosi yakni memberikan penyadaran kepada peserta tentang pentingnya kecerdasan untuk kesuksesan karir maupun pengembangan masyarakat;
    - Kunci sukses dalam pengembangan pribadi dan dalam kegiatan pengelolaan kawasan, kunci sukses yang perlu dikembangkan dalam diri peserta baik untuk kesuksesan hidup, khususnya dalam pengembangan masyarakat;
    - Motivasi diri dengan menumbuhnya energi positif dalam setiap diri peserta sehingga dapat berpikir positif dan optimis dalam menghadapi berbagai peran dan tugas;
    - Pengenalan bagaimana memelihara lingkungan dan mengelola kawasan.
  2. Pelatihan Pengembangan Masyarakat

Pelatihan pengembangan masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan peserta dalam mengembangkan atau pemberdayaan masyarakat. Pelatihan ini mencakup :

- Pemahaman tentang konsep dan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat;
- Pemahaman peran pengembangan masyarakat yang mencakup peran fasilitas, pendidikan, pendamping dan peran teknis;
- Keterampilan pengembangan masyarakat yang mencakup keterampilan berkomunikasi, bekerjasama, mendidik, menyediakan sumber daya, memecahkan konflik, saling memotivasi, manajemen, persentasi riset dan berbagai keterampilan lainnya.

3. Pelatihan Pengembangan Potensi atau Produk Lokal

Kegiatan pengelolaan kawasan di Perkampungan Industri Kecil (PIK) ini, dikembangkan upaya-upaya untuk memecahkan permasalahan dengan cara inovatif untuk meningkatkan peningkatan peluang usaha dan peluang kerja yaitu memanfaatkan hasil kegiatan industri ini menjadi barang yang memiliki kualitas baik dengan harga yang terjangkau, serta mengembangkan sumber daya tenaga kerja untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai pengrajin dalam menciptakan produk yang akan dipasarkan.

4. Pelatihan Pemasaran Produk

Pemasaran produk di Perkampungan Industri Kecil ini, disediakan beberapa fasilitas ruangan pameran untuk barang yang telah jadi. Proses pelatihan mengenai pemasaran produk barang yang ada di PIK, yaitu :

- Peluang akses permodalan dan penguatan usaha masyarakat;
- Peluang dan akses pemasaran produk;
- Pengetahuan dan kemampuan dalam manajemen pemasaran.

5. Pelatihan Penyuluhan Rumah Sehat

Rumah-rumah yang berada di PIK disediakan oleh pihak pengelola untuk masyarakat yang berkerja di PIK sebagai sarana hunian dan tempat usaha. Penyuluhan rumah sehat ini dilakukan untuk memberikan wawasan,

penyuluhan atau penyadaran tentang pentingnya rumah dan lingkungan sehat. Oleh karena itu, kegiatan pengelolaan kawasan yang melibatkan peran serta masyarakat di kawasan Perkampungan Industri Kecil ini perlu dilaksanakan, karena menyangkut masalah kesehatan warga yang berada di lingkungan perkampungan industri

d. Penyuluhan

Disamping pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran warga dalam meningkatkan kualitas kehidupan kampungnya, kegiatan penyuluhan merupakan alternatif lain yang dapat dilaksanakan untuk memberikan wawasan dan kesadaran warga dalam memecahkan permasalahan yang ada sekaligus mengembangkan kualitas kesehatan dan lingkungannya.

### **Kesimpulan**

1. Jenis kegiatan yang ada dalam pengelolaan kawasan baik itu bermanfaat maupun masalah yang akan ditimbulkan. Dari hasil penelitian, diketahui responden yang di PIK BPLIP Pulogadung banyak tidak ikut terlibat dalam partisipasinya mengelola kawasan dan sebagian besar tidak terlibat langsung, responden hanya membayar uang kebersihan sebesar Rp.2.000,- per bulan sebesar 44% dan mayoritas responden tidak memberi pendapat mengenai kegiatan yang ada di masyarakat sebesar 53%.
2. Hambatan yang sering ditemui responden dalam keterlibatannya mengelola kawasannya yaitu warga kurang antusias dalam berpartisipasi sebesar 58%,serta terbatasnya dana warga sebesar 23% Hal ini disebabkan hubungan pengelola dan masyarakat yang kurang baik, sehingga mayoritas masyarakat berdasarkan hasil kuisioner sebesar 76% tidak memberi pendapat mengenai kegiatan yang berlangsung di PIK BPLIP Pulogadung ini.
3. Kondisi fasilitas di PIK sudah sangat baik dan menurut responden, fasilitas-fasilitas yang ada di PIK BPLIP Pulogadung sudah mencukupi kebutuhan sehingga dapat mendukung pelayanan jasa kualitas barang yang ada di PIK. Jumlah responden yang menyatakan bersedia membentuk organisasi hanya 18% dan selebihnya banyak memilih untuk netral, padahal kegiatan organisasi ini bisa meringankan beban pengelola dalam

memelihara kawasannya. Sedangkan, bantuan dari pengelola BPLIP terhadap pemeliharaan kawasan dan fasilitas-fasilitas yang ada di PIK masih terpelihara dengan baik, serta Perkampungan Industri Kecil (PIK) BPLIP yang aman.

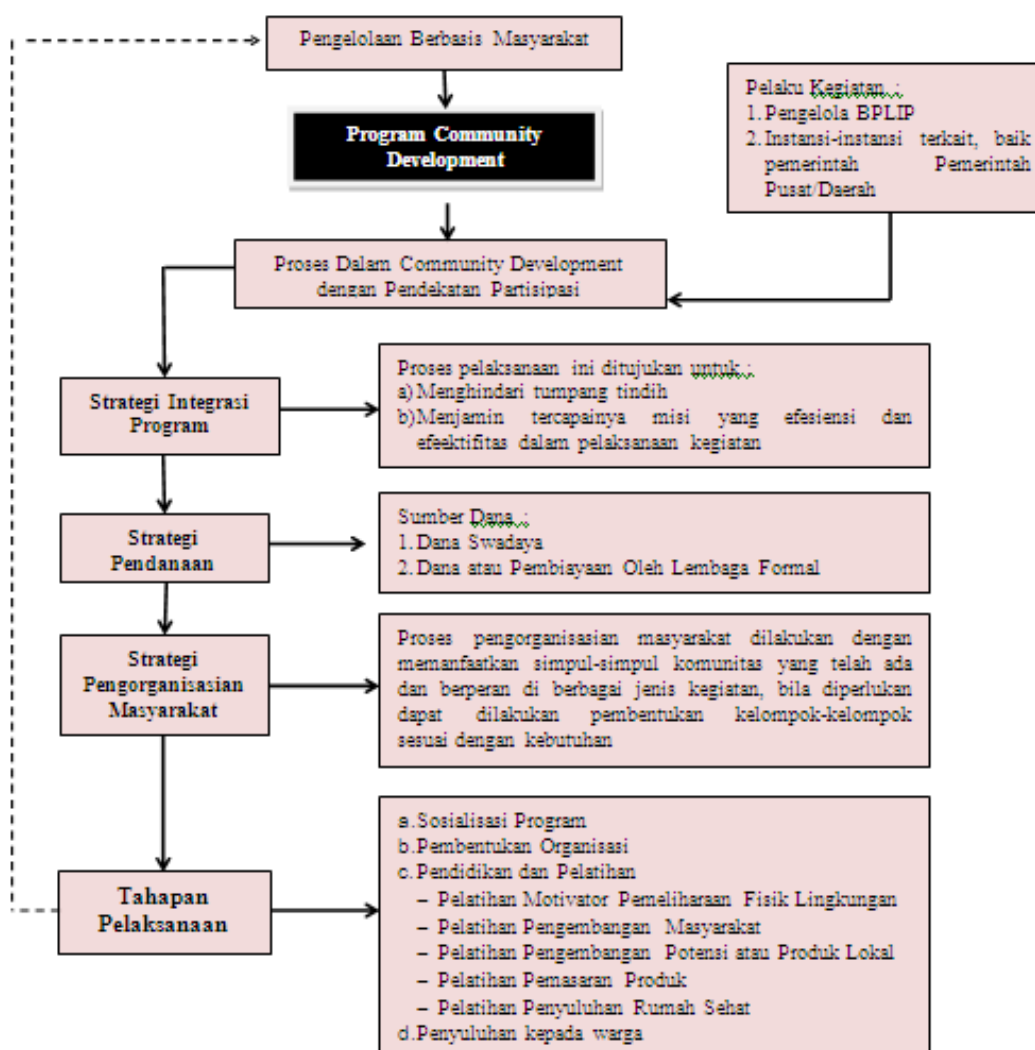
4. Pengetahuan responden mengenai informasi kawasan tempat tinggalnya menjadi kawasan Wisata Belanja banyak tidak diketahui oleh responden karena kurangnya tingkat kepedulian responden terhadap kawasannya. Untuk, biaya pemeliharaan atau perawatan lingkungan lebih banyak diketahui responden sebesar 98%, karena tiap bulan mereka harus membayar uang/biaya pemeliharaan lingkungan.
5. Pengetahuan akan adanya kerjasama antara pihak pengelola dan masyarakat lebih sedikit diketahui karena kurangnya bersosialisasi antara sesama warga dan pengelola. Sedangkan, responden yang mengetahui tata cara mengelola kawasan hanya berjumlah 14 orang.
6. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan tidak memiliki hubungan dengan kegiatan yang berlangsung di PIK BPLIP. Hal ini disebabkan karena di lingkungan kawasan ini telah terdapat peraturan, fasilitas pendukung, serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelola sendiri terhadap pemeliharaan kawasan. Sehingga, masyarakat menjadi tidak memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya.
7. Sikap masyarakat terhadap pengelolaan kawasan tempat tinggalnya menggambarkan sisi positif meliputi pengelolaan masyarakat lebih baik, masyarakat ingin melakukan atas kehendaknya sendiri, biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk pemeliharaan kawasan murah, kebersamaan menimbulkan hubungan yang erat dan dikenal dengan masyarakat PIK yang ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan masih adanya partisipasi dari warga, meskipun sebagian peran serta tersebut terjadi karena keterpaksaan atau kewajiban yang harus dilakukan masyarakat karena himbuan dari pengelola atau pihak RT. Faktor lainnya yang menggambarkan sisi negatif dalam partisipasinya mengelola kawasan meliputi keterbatasan dana, hubungan yang kurang baik antara pengelola dan masyarakat, sehingga

hubungan kedua belah pihak tidak harmonis dalam menjalankan perannya sebagai stakeholder.

8. Peran serta masyarakat perlu ditingkatkan dalam peningkatan SDM melalui pengembangan modal sosial, pengembangan ekonomi warga, serta memperkuat peran dan kapasitas warga dalam mengelola sarana yang ada. Peningkatan SDM diharapkan merubah pola pikir masyarakat secara bertahap terhadap peran sertanya mengelola kawasan dan mengarahkan kepada mereka dalam mengelola dan memelihara sebuah kawasan, bukanlah hal yang sulit karena bekerja sama dengan pihak pengelola BPLIP. Sehingga, hubungan antara pengelola dan masyarakat menjadi erat, dan mendukung kegiatan yang berlangsung di kawasan ini sesuai dengan kebijakan industri kecil. Hal ini dapat menguntungkan kedua belah pihak.
9. Peran serta kerelaan masyarakat terhadap pemeliharaan kawasan dapat disimpulkan masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber dana, waktu, peralatan yang dimiliki, beragamnya pendidikan dan pengalaman. Hal ini dapat dipahami karena masyarakat penghuni perkampungan ini tersebut adalah masyarakat golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang sumber penghasilannya rata-rata dibawah Rp. 1.000.000,- per bulan. Kegiatan ini lebih menekankan kepada masyarakat PIK BPLIP dengan melibatkan beberapa institusi terkait dan pengelola kawasan. Pemaparan lebih jelas dapat dilihat pada Gambar. Model Siklus Pengelolaan Kawasan Berbasis Masyarakat.



**Gambar. Model Siklus Pengelolaan Kawasan Berbasis Masyarakat**



Sumber : Hasil Analisis

### Daftar Pustaka

- Alhusin, Syahri. 2001. *Aplikasi Statistik Praktis Dengan SPSS 9*. Penerbit : PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Statistik Kotamadya Jakarta Timur*.
- Biddle, William. 1965. *"The Community Development" Rediscovery Local Of Initiative*. USA : Richard and Winston. Inc.
- Budhi Wibhawa. 1996. *Model Analisis dan Perubahan Perilaku Manusia*. Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD. Bandung.
- Budimanta, A. 2001. *Prinsip Pengelolaan Community Development*. Makalah Disampaikan pada Kursus Singkat Program Community Development. Jakarta.

- Cox, Fred M., et.al. (eds.).1979. *Strategies of Community Organization, a book of readings*. 3rd.,ed., F.E. Peacock Publishers,Inc., Itasca, Illinois.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. 2005. *Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Menengah 2005-2009*. Penerbit : Deprindag. Jakarta
- Djajadiningrat, Surna Tjahja. 2007. *Pertambangan, Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat*. Tanpa Penerbit.
- Hanna, Mark G. and Robinson, Buddy. 1994. *Strategies for Community Empowerment: Direct action and transformative approaches to social change practice*. EmText : New York

- Hariyono, Paulus. 2007. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Penerbit : Sinar Garfika Offset. Jakarta.
- Hidayat Syarif dan Darwin Syamsulbahri. 2001. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Jakarta.
- Ife, Jim W. 1995. *Community Development: creating community alternatives - vision analysis and practice*. Melbourne : Longman.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta.
- Marzali, Amri. Tanpa Tahun. "Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Nasional", dalam Jurnal Kebudayaan Genta Budaya, No.2 tahun 1. Padang.
- Mulyono, H.R. 2007. *Ilmu Lingkungan*. Penerbit : Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Nasution, Muslimin. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat : Tujuan Proses Pengembangan Masyarakat yang Dibangun Diatas Realitas*, Bandung : Institut Teknologi Bandung.
- Nelson, Nici dan Susan Wright. 1995. *Power and Participatory Development ; Theory And Practise*. Intermediate Technology Publications, UK.
- Neolaka, Amos, M.Pd. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Penerbit : PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Profil Perkampungan Industri Kecil (PIK) BPLIP Pulogadung.2005
- Ramly Najamuddin. Tanpa Tahun. *Pesona Jakarta Ramah Lingkungan*. Penerbit: Grafindo Khazanah Ilmu. Jakarta.
- Rubin, Herbert J, dan Irene S. Rubin. 1992. *Community Organization and Development, 2nd edition*. Macmilan Publik : New York.
- Rudito, Bambang; Arif Budimanta; Adi Prasetijo. 2003. *Akses Peran Serta Masyarakat*. Penerbit : Indonesia Center For Sustainable Development. Jakarta
- Rudito, Bambang; Arif Budimanta; Adi Prasetijo. 2004. *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Penerbit : ICSD. Jakarta.
- Soertjani, Mohammad dkk. 2006. *Lingkungan Hidup*. Penerbit : Institut Pendidikan dan Pengembangab Lingkungan. Jakarta.
- Tropman, John E. et.al. 1996. *Strategies of Community Intervention, Macro Practice. 5th.ed*. F.E. Peacock Publishers, INC., Itasca Illinois.
- Yoeti, Oka A. 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Penerbit : PT. Karya Unipress. Jakarta